

SKRIPSI



**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN
ANAK ANGKAT (*ANAK DIBUANG TAMA TAMBUK*) DALAM
MEMPEROLEH HARTA WARISAN DI TANA TORAJA
(Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl)**

OLEH

AGUSTINA MANGA MANTUNG

B 111 09 453

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (*ANAK DIBUANG TAMA TAMBUK*) DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN DI TANA TORAJA (Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl)

Disusun dan diajukan oleh

AGUSTINA MANGA MANTUNG

B 111 09 453

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian
studi sarjana pada Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP ANAK ANGKAT (*ANAK DIBUANG TAMA TAMBUK*) DALAM MEMPEROLEH HARTA WARISAN DI TANA TORAJA

(Studi Kasus Putusan No.59/ PDT.G/2009/ PN.MKL)

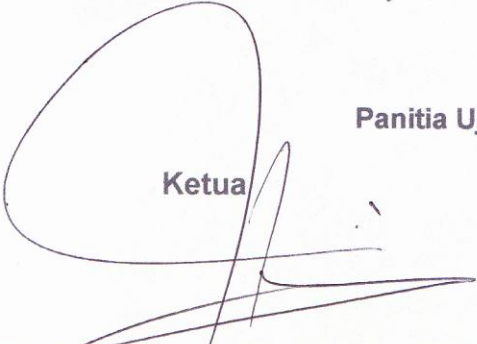
Disusun dan diajukan oleh

AGUSTINA MANGA MANTUNG
B111 09 453


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 21 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua


Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.H
NIP. 19690727 199802 2 001

Sekretaris


Dr. H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 19540101 198303 1 007

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

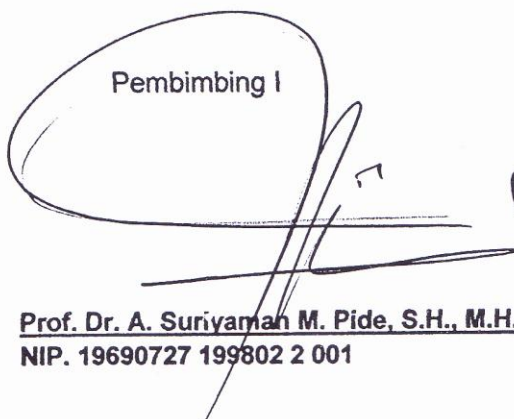
Diterangkan bahwa skripsi dari :

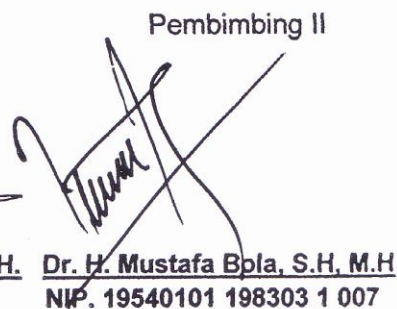
Nama : AGUSTINA MANGA MANTUNG
Nim : B11109453
Bagian : HUKUM ACARA
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (*Anak Dibuang Tama Tambuk*) Dalam Memperoleh Harta Warisan Di Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.MKL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 17 April 2013

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. A. Suriyaman M. Pide, S.H., M.H.
NIP. 19690727 199802 2 001

Pembimbing II

Dr. H. Mustafa Bpla, S.H., M.H.
NIP. 19540101 198303 1 007

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : AGUSTINA MANGA' MANTUNG
No. Pokok : B111 09 453
B a g i a n : Hukum Acara
Judul Skripsi. : Penyelesaian Sengketa terhadap Kedudukan Anak Angkat
(*Anak Dibuang Tama Tambuk*) dalam Memperoleh Harta
Warisan di Tana Toraja
(Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.MKL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.



 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AGUSTINA MANGA MANTUNG (B11109453) Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam Memperoleh Harta Warisan Di Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl). Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Ibu Suriyaman Mustari Pide sebagai pembimbing I dan Bapak Mustafa Bola sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat (anak dibuang tama tambuk) dalam memperoleh harta warisan di Tana Toraja dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri jika terjadi sengketa dalam hal proses pewarisan harta yang sudah merupakan *tekken* anak angkat dari orang tua angkatnya.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan penelusuran bahan-bahan pustaka atau melalui studi kepustakaan yang relevan, yaitu literatur, dokumen dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) masuk ke dalam sistem kekerabatan orang tua angkatnya dan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkat namun harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai anak khususnya dalam melaksanakan upacara *rambu solo'* (2) dasar pertimbangan hakim dalam putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.MKL adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:1413 K/Pdt/1988 tanggal 18-5-1990 yang menyebutkan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkankan oleh orang tua angkatnya serta norma adat di Tana Toraja yang menyatakan bahwa pembagian warisan ditentukan dari besar kecilnya pengorbanan di upacara *rambu solo'* orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak ada yang mampu penulis dapat katakan selain ungkapan terima kasih yang tulus bagi kemuliaan TUHAN YESUS KRISTUS yang telah memberikan hikmat, kebijaksanaan, serta penyertaanNya dalam menuntun penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk Dalam Memperoleh Harta Warisan Di Tana Toraja (Studi Kasus Putusan No.59/Pdt.G/2009/PN.Mkl)”** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda terkasih **Piter Paan Mantung (alm)** dan Ibunda terkasih **Esther Manga' Pata'dungan** yang penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, mencintai dengan tulus bahkan juga sangat berperan memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan materil yang penulis terima selama ini dari kakak Theofilus Mantung, Calvein Tuppa, Jeni Manga Mantung serta adik yang terkasih Andarias Mantung dan Pandu Dhikanata Mantung, terima kasih atas semangat yang kalian berikan selama ini.

Terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas pula dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. B, Sp B.O.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM
3. Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., Rastiawaty, S.H., M.H., dan Fauziah P. Bakti, S.H., M.H selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta membagikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam setiap konsultasi terhadap mata kuliah yang akan deprogram pada tiap semester.
6. Seluruh guruku Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama

menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas, serta para staf akademik kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal melengkapi administrasi.

7. Bapak Bony Daniel, S.H selaku hakim Pengadilan Negeri Makale dan Bapak Paulus Pasang Kanan sebagai tokoh lembaga adat di Tana Toraja yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat ku lin Zefanya L.S, Yonna Pongpabia', Novin Tangkelangi dan Darius R. Paembonan dan teman-teman Doktrin '09 terima kasih kawan buat persahabatan kita selama ini yang sama-sama berjuang untuk satu tujuan. Semoga persahabatan kita tetap terjaga dan tetap saling mengasihi.
9. Teman-teman ku di keluarga besar PMK FH-UH tanpa terkecuali serta kakak-kakak PMK FH-UH yang telah membimbing penulis mulai dari masuk sampai selesai.
10. Teman-teman ku di KTB: Kak Thina, Floriny Deasy V. P, Alfira N Samad, Ivonyunita Sampepadang, Avelyn Pingkan K, dan Gita L Pongmasangka terima kasih untuk doa dan dukungan teman-teman. GBU.
11. Sahabat-sahabat ku di KKN Gelombang 82 di posko Desa Ujung Pero, Kec. Sabbang Paru, Kab. Wajo: Kak Andi Bau Emil Salim, Kak Wawan Hermawan, Kak Miming Asminto, Kak

Agriani Gobel, Yuliana Hau, Hasruni Satya Taruma dan Wa Ode Friza Nurbani SQ terima kasih buat persaudaraan kita selama KKN. Semoga persaudaraan dan persahabatan kita tidak ditelan waktu, teman untuk selamanya.

Semoga TUHAN YESUS KRISTUS senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan segala limpahan kasih karuniaNya. Penulis sadar bahwa karya ini tidak sempurna oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hukum dan Masyarakat	7
B. Hukum Waris Adat.....	10
1. Defenisi Hukum Waris Adat.....	10
2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat	12
3. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	13
4. Sistem Hukum Waris Adat.....	15
5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat	20
6. Sistem Kekerabatan Masyarakat Tana Toraja	25
C. Pengangkatan Anak	28
1. Defenisi Pengangkatan Anak	28
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	29
3. Motivasi Pengangkatan Anak	31
4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	32

5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tana Toraja.....	34
D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	37
1. Arti dan Prinsip Pembuktian	37
2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata	39
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja.....	53
1. Topografi	54
2. Administrasi.....	55
3. Kependudukan	56
4. Kehidupan Sosial Budaya	57
B. Harta Warisan dalam Masyarakat Toraja.....	59
C. Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Memperoleh Harta Warisan Di Tana Toraja	62
D. Pertimbangan Hakim Dalam Prosedur Pembuktian Sengketa Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam Memperoleh Harta Warisan pada Pengadilan Negeri Makale	67
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mengharapkan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan. Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Namun apabila keinginan untuk mendapatkan anak tidak dapat terpenuhi maka banyak orang tua akan melakukan pengangkatan anak yang diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga sendiri.

Pengangkatan anak dalam masyarakat di Indonesia berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang berlaku berbeda-beda. Pada masyarakat Tana Toraja pengangkatan anak sering ditemui meskipun mereka sudah mempunyai keturunan karena pada umumnya masyarakat Tana Toraja memiliki keyakinan bahwa semakin banyak anak semakin banyak pula *Toding* (kerbau) yang akan ikut di kubur saat mereka meninggal yang merupakan lambang prestise bagi mereka.

Pengangkatan anak di Tana Toraja biasanya diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga. Pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat yang disebut *dikai'* yang artinya diikatkan sebuah gelang ditangan anak yang akan diangkat biasanya menggunakan benang atau *diku'ku'* (digundul) oleh orang tua kandung atau orang tua angkat. Setelah upacara *ma'kai'* atau *maku'ku* maka resmilah anak ini menjadi anak angkat. Upacara pengangkatan anak biasanya disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan keluarga orang tua kandung dan orang tua angkat kemudian calon orang tua angkat menyampaikan maksudnya dengan menyatakan anak itu *lana patobang tama ba'tang, lana buang tama tambuk* yang artinya anak itu akan diangkat menjadi anak angkat yang sama dengan anak kandung, sehingga anak angkat dalam bahasa Toraja dikenal dengan istilah *anak dibuang tama tambuk*.

Pengangkatan anak di Tana Toraja biasanya ditandai dengan diberikan tanda yang disebut dalam hukum Adat Toraja *di Tekkenni* sebagai lambang anak tersebut sudah diangkat sebagai anak. *Di Tekkenni* artinya diberikan sesuatu barang yang dipunyai oleh orang tua angkat apakah benda bergerak atau tidak bergerak kepada anak angkatnya dan di Toraja biasanya diberikan sawah atau kerbau sebagai harta yang paling berharga.

Namun pada kenyataannya banyak persoalan yang sering terjadi dari pengangkatan anak di Tana Toraja. Persoalan yang sering muncul

adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan status hukum dari harta yang sudah merupakan *tekken* anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) dari orang tua angkatnya seperti salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Saluputti, Tana Toraja antara L.S.Tanggaran (penggugat) melawan Markus Misu Sanggalangi', S.H (tergugat I), Drs. Paulus Karaeng (tergugat II) dan Adi' (tergugat III) yang mempermasalahkan mengenai harta warisan yang sudah merupakan *tekken* yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya.

Masyarakat Toraja sebelum mengenal hukum tertulis, cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa adalah menggunakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Tana Toraja yang dilaksanakan melalui musyawarah oleh tokoh-tokoh adat.

Namun sekarang telah terjadi pergeseran paradigma dalam masyarakat hal ini dibuktikan dengan berbagai aktifitas penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa yang menyangkut waris dikalangan masyarakat Tana Toraja sudah telah mengalami perubahan. Masyarakat Tana Toraja sudah mulai cenderung lebih menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan karena dianggap lebih mampu memberikan kepastian hukum.

Namun di satu sisi harapan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan justru kadang kembali menemukan

permasalahan baru berupa resistensi atas sebuah keputusan pengadilan terhadap perkara tertentu karena dianggap oleh sebagian masyarakat tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, sedangkan salah satu tujuan hukum adalah memberikan keadilan.

Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata keadilan yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus dijunjung tinggi. Penegakan keadilan di dalam masyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan suatu keadilan maka diperlukan suatu kegiatan peradilan. Sampai saat ini Indonesia sebagai negara dengan keberagaman hukum memang telah memiliki Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951 yang bertujuan untuk memusatkan segala perkara umum ke peradilan umum nasional. Dalam praktik peradilan seperti ini di Indonesia, hakim sering menemui kesulitan saat harus menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan khususnya menyangkut masalah pembuktian. Kesulitan yang paling utama dihadapi hakim adalah karena sebagian besar perkara yang menyangkut tentang hukum adat tidak mempunyai alat bukti tertulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang tersebut untuk mengkaji bagaimana kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) di Tana Toraja yang merupakan salah satu daerah yang masih memegang kuat sistem hukum adat dalam memperoleh harta warisan dan bagaimana penerapan norma dan asas-asas hukum adat yang digunakan hakim dalam praktik peradilan perdata di Pengadilan Negeri, sehingga melahirkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa dengan judul penelitian “ Penyelesaian Sengketa terhadap Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam Memperoleh Harta Warisan di Tana Toraja (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 59/Pdt.G/2009/PN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) dalam memperoleh harta warisan menurut hukum waris adat Tana Toraja ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) di Tana Toraja dalam memperoleh harta warisan di Pengadilan Negeri Makale ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) dalam memperoleh harta warisan menurut hukum waris adat Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses pembuktian terhadap kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) di Tana Toraja dalam memperoleh harta warisan pada Pengadilan Negeri Makale.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan untuk menambah keilmuan dan memberikan informasi kepada pihak yang tertarik pada hukum waris adat Tana Toraja dalam kaitannya dengan kedudukan Anak Angkat (*Anak Dibuang Tama Tambuk*) sebagai ahli waris menurut hukum waris Tana Toraja.
2. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum seperti hakim dan pengacara yang berdomisili dan bertugas di Tana Toraja dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak dan pewarisannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Dan Masyarakat

Hukum adalah seperangkat atau kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar maka akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal (Ahmad Ali, 2008:30-31).

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu unsur budaya, maka seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum, jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha kearah terwujudnya keadilan (Ahmad Ali, 2009:438).

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum

identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Ketika keberadaan dan kemampuan undang-undang sedemikian diagungkan, muncul pandangan yang mengidentikan hukum dengan undang-undang. Bagi masyarakat yang religius hukum diidentikkan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama. (Ahmad Ali, 2008:12)

Hukum tata negara kita sebagian besar dikuasai oleh kebiasaan yang disebut convention dan tidak mempunyai kodifikasi. Apabila diadakan perbandingan antara hukum kebiasaan dengan undang-undang maka dapat diketahui (R. Soeroso, 2001:155-156) yaitu:

1. Kelemahan-kelemahan hukum kebiasaan
 - a. Bahwa hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya.
 - b. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam.
2. Persamaan antara hukum kebiasaan dan Undang-Undang
 - a. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum terdapat di dalam masyarakat.
 - b. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa.

Meskipun kebiasaan bukan lagi sumber hukum yang penting dalam masyarakat modern, tetapi bagaimana pun kebiasaan masih sering dijadikan sumber hukum di dalam praktek peradilan di Indonesia. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” (Ahmad Ali, 2008: 91).

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Hukum tidak bisa dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah, karena seperti yang dikatakan oleh Donald Black, “Hukum adalah pengendalian sosial oleh pemerintah”. Tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang mencakupi kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh suatu pemerintah. Di Indonesia, contohnya hukum adat yang berlaku adalah yang diakui berlakunya oleh pemerintah, demikian pula berlakunya hukum Islam. Baik hukum adat maupun hukum Islam, bukanlah produk pemerintah, tetapi diakui sebagai aturan hukum yang berlaku, nanti setelah diakui oleh pemerintah. Di Indonesia secara konstitusional (Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 281 ayat 3 UUD 1945 mengakui hak masyarakat adat, tetapi dengan syarat : *a. Sepanjang masih hidup, b. sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh undang-undang* (Ahmad Ali, 2009:223-224).

B. Hukum Waris Adat

1. Defenisi Hukum Waris Adat

Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (material) dan harta cita (nonmateriil) dari generasi satu kepada generasi. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat patrilineal, matrilineal ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan (Surini Ahlan Sjarif, 2005:1).

Hukum waris adat adalah yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris (H.Hilman Hadikusuma, 2003:7).

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (H. Zainuddin Ali, 2008:1).

Pengertian hukum waris adat yang di berikan oleh Soepomo (Soerjono Sukanto, 2011:259), yaitu :

“hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.

Sedangkan Ter Haar menyatakan (H.Hilman Hadikusuma, 2003:7):

“hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan sebagai berikut (Iman Sudiyat, 1981:151).

- a. Hak purba / perbuatan / ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah;
- b. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris;
- c. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal;
- d. Struktur pengelompokan wangsa / sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan;
- e. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris; hukum waris dalam arti yang luas, yaitu:

penyelenggaraan pemindah-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Berdasarkan definisi hukum waris adat tersebut di atas termuat unsur-unsur dalam hukum waris adat, yaitu:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris (H.Hilman Hadikusuma, 2003:13).

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga (H. Zainuddin Ali, 2008 :2).

b. Harta Warisan

Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi (H.Hilman Hadikusuma, 2003:11).

Pengertian warisan yang dikemukakan Wirjono Prodjodikoro dalam H. Hilman Hadikusuma yaitu:

“warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya (H. Zainuddin Ali,2008 :3).

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris baik melalui wasiat maupun melalui hibah (H. Zainuddin Ali,2008 :6).

Ahli waris ialah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya adalah anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga si pewaris yang pertama-tama mewaris adalah anak-anak kandung, jadi ahli waris utama dalam hukum adat, dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah hubungan darah (Iman Sudiyat, 1981:162).

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Pancasila di dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berpikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar supaya penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang kembali kealam baka (H.Hilman Hadikusuma, 2003:14).

Asas-asas hukum waris adat (H. Zainuddin Ali, 2008:8,9) yaitu:

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.

4. Sistem Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok (Soerjono Soekanto, 2011:261), yaitu :

- a. Garis pokok keutamaan
- b. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis yang hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

1. Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris
2. Kelompok keutamaan II : Orang tua pewaris
3. Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris, dan keturunannya.
4. Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris.
5. Dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
2. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya (1979) menerangkan bahwa Hukum Adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan (R. Abdoel Djamli, 1983:152) yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewaris secara perseorangan harta

peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya secara individual kepada (para) ahli waris.

b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

1. Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.

2. Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal.

Ada beberapa sistem pewarisan yang digunakan dalam pembagian warisan (H.Hilman Hadikusuma, 2003:23-29) yaitu:

a. Sistem Keturunan

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. *Sistem Parental*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

2. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol

pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

3. *Sistem Parental* atau *Bilateral*, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti Batak dimana berlaku adat *manjae* (Jawa, *mencar*, *mentas*); atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggir*, di pantai-pantai selatan Lampung.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan

memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga lain. Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektip nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem kolektip ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar.

d. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada *anak tertua* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga

menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Pada umumnya sistem kolektip dan sistem mayorat nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya.

5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Hilman Hadikusuma membagi 3 (tiga) bagian jenis harta warisan (H. Hilman Hadikusuma, 2003:38-46) yaitu:

a. Harta Pusaka

Harta pusaka dibedakan menjadi 2 (dua) , yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat

dibuktikan berdasarkan keterangan disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian kakek / nenek atau ayah / ibu. Pada masyarakat adat parental harta pusaka ini sudah tidak dipertahankan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual.

b. Harta Bawaan

Kedudukan harta bawaan dalam masyarakat adat yang bersifat parental / bilateral, dirumuskan dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing isteri dan suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

c. Harta Pencaharian

Semua harta yang berasal dari jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak, perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Termasuk dalam harta pencaharian ialah “harta kepandaian”, yaitu semua harta yang diperoleh karena pekerjaan pewaris yang khusus karena kepandaannya. Misalnya harta yang didapat dari kepandaian karena dia seorang seniman dan pencipta lagu. Yang termasuk harta pencaharian ialah semua hadiah atau pemberian dari anggota atau

kerabat, sejawat atau pihak lain dan semua hutang-piutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan. Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam yang beralih harta peninggalan pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari si peninggal warisan, sedangkan menurut B.W. yang beralih adalah semua warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari si peninggal warisan.

Hukum waris adat meliputi bermacam-macam harta peninggalan (H. Hilman Hadikusuma, 2003:38-46) seperti:

a. Harta peninggalan tidak terbagi

Harta peninggalan yang tidak terbagi adalah seperti *harta pusaka* di Minangkabau, *tanoh buway* atau *tanoh menyanak* di Lampung, *tanah tembawang* di Daya Benawas, *tanah kalakeran* di Minahasa, *tanah dati* di Ambon. Biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur (Poyang, buyut) dan merupakan milik bersama sekerabat sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat .

Harta pusaka tinggi tidak terbagi adalah karena kedudukannya sebagai milik kerabat dan fungsi hukum adatnya untuk kehidupan kerabat bersangkutan. Selama masyarakat hukum adat itu ada, ada pengurus, ada harta kekayaan dan ada warga adatnya yang setia, maka selama itu ia tidak terbagi-bagi pemilikannya secara

perseorangan. Tidak terbagi-baginya harta peninggalan itu adalah dikarenakan kepentingan dan kegunaannya sebagai pemersatu kekerabatan:

1. Tidak dapat dibagi-bagikan pemilikan harta pusaka tinggi adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik kerabat yang merupakan atribut dari suatu kesatuan hidup kekerabatan adat dibawah pimpinan kepala adat. Misalnya balai adat, rumah kerabat, alat-alat perlengkapan adat, benda-benda suci dan sebagainya itu memang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya, oleh karena ia diperlukan untuk kepentingan kerabat bersangkutan sebagai masyarakat hukum adat.
2. Tidak dapat dibagi-bagikannya pemilikan harta pusaka rendah adalah disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat kecil yang berfungsi dan berperanan sebagai tali pengikat kesatuan keluarga-keluarga dibawah pimpinan kepala kerabat bersangkutan, walaupun fungsi dan peranannya sebagai bekal bersama, oleh bersama dan untuk bersama sudah lemah.
3. Tidak terbagi-baginya pemilikan harta peninggalan yang bersifat harta keluarga serumah adalah disebabkan maksud dan tujuannya untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota menjadikannya sebagai tempat kediamannya.

b. Harta Peninggalan Terbagi

Terbagi-baginya harta peninggalan itu dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau sesudah pewaris wafat. Ketika pewaris masih hidup dapat terjadi pemberian dari sebagian harta yang akan ditinggalkan pewaris kepada waris untuk menjadi bekal kehidupan dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru berpisah dari kesatuan rumah tangga orang tua (Jawa, *mencar, mentas*; Batak, *manjae*).

c. Harta Peninggalan Belum Terbagi

Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi pada waris adakalanya belum dibagi karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Penangguhan waktu pembagian antara lain disebabkan beberapa hal:

1. Masih ada orang tua,
2. Terbatasnya harta peninggalan
3. Tertentu jenis dan macamnya.
4. Pewaris tidak punya keturunan,
5. Para waris belum dewasa,
6. Belum ada waris pengganti,
7. Diantara waris belum hadir,
8. Belum ada waris yang berhak,
9. Belum diketahuinya hutang piutang pewaris.

Apabila setelah pewaris wafat masih ada orang tua pewaris, janda atau dudanya yang masih hidup dan masih dapat mengurus harta peninggalan, baik untuk jaminan hidupnya maupun sebagai tempat berkumpulnya para waris, maka selama orang tua masih hidup harta peninggalan tidak dilakukan pembagian. Begitu pula dikarenakan terbatasnya harta peninggalan, misalnya dikarenakan pewaris hanya meninggalkan sebuah bangunan rumah dan pekarangannya sedangkan waris banyak dan rumah dan pekarangan itu masih didiami dan diurus salah satu dari waris, maka untuk kepentingan waris yang bersangkutan harta peninggalan belum diadakan pembagian. Demikian pula jika ketika pewaris wafat sedangkan para waris belum dewasa, masih anak-anak yang belum mampu untuk menerima harta peninggalan, maka pembagian ditangguhkan sampai para waris dewasa.

6. Sistem Kekerabatan Masyarakat Tana Toraja

Sistem kekerabatan masyarakat Tana Toraja tidak bisa dilepaskan dari *banua Tongkonan* (rumah adat) dan *Liang* (kuburan keluarga). Rumah Tongkonan mempunyai fungsi sosial yaitu mempersatukan semua keturunan dari Tongkonan itu, dalam istilah Toraja disebut *Umpasitandan Rara Buku*. Tongkonan merupakan sumber kekuasaan di suatu kampung, sebagai tempat membinan keluarga dan keturunannya serta warisannya.

Tongkonan berasal dari kata *Tongkon* adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan

masalah. Tongkonan ini mula-mula didirikan oleh *pangala tondok* (penguasa), sebagai tempat untuk menjalankan pemerintahan dan tempat untuk membuat peraturan-peraturannya. Akan tetapi perkembangan jaman maka *bulo dia'pa'* atau rakyat biasa juga mendirikan *banua tongkonan* yang dahulunya rumah mereka tidak disebut *tongkonan*, tetapi hanya disebut *banua* (rumah).

Menurut para pemuka adat *Banua Tongkonan* (rumah adat) ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan peraturan pemerintahan adat.
2. Sebagai istana atau tempat tinggal.
3. Sebagai tempat menyimpan dan membina warisan keluarga, baik warisan berupa hak dan kekuasaan maupun warisan berupa harta pusaka.
4. Sebagai tempat duduk bermusyawarah dan menyelesaikan persoalan keluarga dan masyarakat.
5. Sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk mendengarkan perintah dari pemangku adat di tongkonan tersebut.
6. Sebagai pusat tempat melaksanakan setiap kegiatan adat atau upacara adat baik rambu solo' maupun rambu tuka' oleh keluarga dari tongkonan tersebut.
7. Sebagai tempat menuturkan silsilah keluarga dari tongkonan tersebut.

8. Sebagai lambang persatuan dan pusat pembinaan keutuhan keluarga dari *tongkonan* tersebut.

Sistem keturunan yang dianut di Tana Toraja adalah sistem keturunan Parental atau Bilateral. Untuk menarik garis keturunan seseorang didasarkan pada garis keturunan ibu dan ayah. Jadi seseorang mempunyai hak di Tongkonan ayah dan ibunya. Ada beberapa jenis tongkonan yang ada di Toraja (L.T Tangdilintin,1975:9) yaitu:

- a. Tongkonan Layuk, rumah adat tempat membuat peraturan dan penyebaran aturan-aturan.
- b. Tongkonan Pekamberan atau Pakaindoran, rumah adat tempat melaksanakan aturan-aturan. Biasanya dalam suatu daerah terdapat beberapa tongkonan, yang semuanya bertanggung jawab pada Tongkonan Layuk.
- c. Tongkonan Batu A'riri, rumah adat yang tidak mempunyai peranan dan fungsi adat, hanya sebagai tempat pusat pertalian keluarga.
- d. Barung-barung, merupakan rumah pribadi. Setelah beberapa turunan (diwariskan), kemudian disebut Tongkonan Batu A'riri.

Mengenai toraja yang menganut sistem parental yang menganut garis keturunan dari dua sisi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

Ada dua bentuk pembagian warisan pada masyarakat Tana Toraja yaitu dengan:

- a. *Ditekkenni* yaitu pemberian harta kekayaan atau warisan secara langsung dari pewaris kepada warisnya saat pewaris masih hidup. Dengan kata lain *ditekkenni* adalah pemberian warisan dengan cara hibah.
- b. *Ma'rinding* yaitu pemberian warisan kepada ahli waris setelah pewaris memberikan pengorbanan kepada pewaris dalam bentuk pemotongan kerbau atau babi. *Ma'rinding* dilaksanakan setelah adanya kematian.

C. Pengangkatan Anak

1. Defenisi Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri (Oemarsalim, 2006:28).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, memberikan istilah tentang anak dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan konsepsi yang berbeda-beda. Dalam pasal 1 dapat ditemukan beberapa istilah dimaksud, yaitu: anak terlantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Anak angkat diberikan defenisi sebagai berikut, anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan,

dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Fuad Muhammad Facharuddin memberikan defenisi anak angkat yang berbeda dengan defenisi anak angkat dalam konteks *adopsi* adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan *nasab* dengan orang tua aslinya (H. Ahmad Kamil, 2008:54).

Pengangkatan anak atau adopsi anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat anak timbul suatu hubungan hukum (Soedharyo Soimin, 2001:35).

Pengangkatan anak adalah mengangkat anak atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui pengadilan. Alasan dilakukannya pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan (Darwan Prinst, 2003:94).

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak (H. Ahmad Kamil, 2008:53), misalnya:

- a. Staatsblad 1917 nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari

KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- e. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat

oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.

- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "...Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam."
- h. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

3. Motivasi Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan atau motivasi. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan (H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008:66).

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2002). Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau diterlantarkan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan maslahat (H. Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008:66).

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan (H. Hilman Hadikusuma, 2003:79) seperti:

- a. Tidak mempunyai keturunan,
- b. Tidak ada penerus keturunan,
- c. Menurut hukum adat perkawinan setempat,
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan,
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan,
- f. Kebutuhan tenaga kerja.

4. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah *dikukut*, *dipupon*, *diangkat* sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara (Iman Sudiyat, 1999:102) yaitu:

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para kepala persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum.

Teer Haar menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan social kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik *material* maupun *immaterial*, misalnya: gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat adalah *terang* dan *tunai*. Terang, ialah suatu prinsip legalitas, yang berarti bahwa perbuatan hukum itu dilakukan di hadapan dan diumumkan di depan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan telah dianggap semua orang mengetahuinya. Sedangkan, tunai berarti perbuatan itu akan selesai seketika pada saat itu juga, tidak mungkin ditarik kembali (H. Ahmad Kamil, 2008:32).

5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Tana Toraja

Pengangkatan anak di Tana Toraja pada umumnya dilakukan dengan cara meminta izin atau persetujuan kepada orang tua si anak yang akan diangkat. Pengangkatan anak harus diketahui oleh keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga orang tua kandung si anak dan keluarga orang tua angkat. Upacara pengangkatan anak harus diberitahukan kepada pemangku-pemangku adat dan masyarakat umum.

Apabila upacara itu dilakukan oleh golongan *kaunan* atau masyarakat biasa disebut *mangnganta'* atau *ma'basibali*, sedangkan kalau dilakukan oleh golongan *Puang*, *Ma'dika*, atau *Tomakaka Matasak* maka disebut *ma'palangganpara*, *massura' tallang*, *merok* atau *ma'bua'*. Upacara ini termasuk *rambu tuka'* yaitu upacara syukuran atas bertambahnya anggota keluarga.

Pengangkatan anak baru dikatakan sah baik pengangkatan anak yang masih kecil maupun pengangkatan anak yang sudah besar maupun pengangkatan anak terhadap orang yang sudah dewasa (pemberani) apabila dalam pelaksanaannya dihadiri dan disaksikan oleh tua-tua adat (pemangku adat) dan tokoh masyarakat lainnya kemudian diumumkan kepada masyarakat. Pelaksanaan syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak seperti ini maka dapat dikatakan pengangkatan anak itu sudah sah menurut hukum adat Tana Toraja.

Setelah hari pelaksanaan tiba dipotong seekor babi atau ayam di depan rumah sebagai persembahan kepada dewa-dewa, darah babi atau

ayam yang dipotong tadi dimasukkan ke dalam *suke disura'* (bambu yang diukir). Setelah *tobara'* memercik darah ayam atau babi itu pada dahi atau telapak tangan (*ditoding*) anak yang akan diangkat, kemudian rambut anak itu *dikai* (diikatkan sebuah gelang ditangan anak yang akan diangkat biasanya menggunakan benang) atau *diku'ku'* (digundul) oleh orang tua kandung atau orang tua angkat yang diarahkan oleh *tobara'* (pendeta aluk todolo) maka anak tersebut dikatakan sah.

Setelah upacara *ma'kai* atau *maku'ku* ini maka resmilah anak ini menjadi anak angkat (*dianak*), sehingga dianggap bahwa seolah-olah anak itu baru lahir. Upacara *ma'kai* atau *maku'ku* yang dilakukan oleh orang tua angkat mengandung pengertian yaitu :

1. Peralihan dari suatu masa ke masa yang lain
2. Sebagai tanda pengesahan anak angkat

Bagi anak yang sudah besar yang akan diangkat tidak perlu lagi dengan upacara semacam ini, tetapi cukup dengan penyesuaian kehendak dari orang tua biologisnya dengan calon orang tua angkat anak itu, serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tua-tua adat dan masyarakat, kemudian calon orang tua angkat anak itu, serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, tua-tua adat dan masyarakat, kemudian calon orang tua angkat menyampaikan maksudnya dengan menyatakan anak itu *lana patobang diba"tang, lana buang tama tambuk* yang artinya anak itu akan diangkat menjadi anak angkat yang sama dengan anak kandung.

Jika pengangkatan anak ini disertai dengan pemberian *ba'gi/tekken* (hibah), hibah wasiat (*didandian ba'gi*) oleh orang tua angkatnya sebagai tanda maka pemberian itu harus diketahui pula oleh keluarga dan ahli waris yang mengangkat anak itu.

Jika pengangkatan anak terhadap seorang pemberani (sudah dewasa) maka prosedurnya hanya persetujuan antara orang yang akan mengangkat dengan calon anak angkat. Apabila anak angkat menyetujui maka dilakukanlah upacara pengangkatan anak tersebut sesuai dengan stratifikasi keturunan anak angkat disertai dengan pemberian *ba'gi* atau *janji ba'gi*.

Prosedur pengesahan pengangkatan anak di Tana Toraja yang harus ditempuh untuk melaksanakan pengangkatan anak di Tana Toraja sebagai berikut:

1. Orang yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut harus ada persetujuan antara orang tua biologis dari anak itu dan jika anak yang diangkat sudah besar maka ia pun dimintai persetujuannya.
2. Pengangkatan untuk seorang pemberani (sudah dewasa) tidak perlu persetujuan antara orang tua biologis cukup persetujuan antara orang yang akan diangkat dengan orang yang akan mengangkatnya.
3. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara adat, apabila anak yang akan diangkat masih kecil *diku'ku* (digundul)

tetapi apabila yang diangkat sudah besar atau seorang pemberani maka tidak perlu *diku'ku* atau *dikai'*. Setelah *dikai'* maka dilakukanlah upacara adat yang sesuai dengan stratifikasi anak angkat.

4. Upacara adat itu harus dilakukan oleh *tobara'* (pendeta aluk todolo).
5. Harus disaksikan oleh tokoh masyarakat, tua-tua adat, keluarga dan masyarakat.
6. Apabila pengangkatan anak itu disertai dengan pemberian *ba'gi* atau janji *ba'gi* terhadap anak angkat maka harus ada persetujuan dari keluarga orang tua angkat dan ahli waris lain.

D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

1. Arti dan Prinsip Pembuktian

Dalam suatu proses perkara perdata Hakim (Majelis) yang memeriksa perkara memerlukan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal/ membantah dari Tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing-masing ingin mengajukan bukti-bukti untuk dirinya itu hanya mungkin dilakukan dengan cara pembuktian.

Sedangkan maksud dari "*membuktikan*" dari pihak Penggugat maupun Tergugat itu berarti, memberi fakta-fakta sebanyak-banyaknya

dari pihak tersebut guna keyakinan dan memberikan kesimpulan kepada Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutananya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dali-dalil sangkalan/ bantahannya Tergugat.

Membuktikan berarti berkaitan dengan penyajian atau pengajuan fakta-fakta / fakta hukum dengan alat-alat bukti sah, baik dari Pengugat maupun dari Tergugat (R. Soeparmono, 2005:111).

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak lawan saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak yang penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.

Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya (Retnowulan Sutantio, 2009:58).

Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan (Teguh Samudera, 2004:9).

Yang dimaksud dengan “mempunyai sesuatu hak”, dalam pasal 163 H.I.R adalah misalnya, bahwa pengugat atau tergugat menyatakan bahwa ia berhak atas sawah sengketa, oleh karena ia memperolehnya itu berdasarkan pembelian dari seseorang. Yang dimaksud dengan “menyebutkan sesuatu perbuatan”, misalnya bahwa ia telah diangkat sebagai anak angkat. Perkataan “untuk meneguhkan haknya” berarti bahwa pengugat atau tergugat yang mendalilkan adanya hak atau kejadian tersebut, yang berkewajiban untuk membuktikan dalilnya itu. Perkataan “untuk membantah hak orang lain”, misalnya, pihak pengugat / tergugat yang mendalilkan adanya hak tersebut, dan tergugat / pengugat membantah hal tersebut (Ny. Retnowulan Sutantio, 2009: 60-61).

2. Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Alat-alat bukti yang sah dalam Pasal: 164 HIR/284 RBg, yaitu:

- a. Bukti Surat / Tulisan;
- b. Bukti Saksi;
- c. Bukti Persangkaan;
- d. Bukti Pengakuan;
- e. Bukti Sumpah.

Selain daripada alat-alat pembuktian surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu hasil pemeriksaan setempat, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal:

Pasal 153 (1) HIR yang berbunyi:

”jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris daripada dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim”.

Pasal 154 HIR (hasil penyelidikan orang ahli) yang berbunyi:

”jika pengadilan menimbang negeri menimbang, bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh orang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya”.

a. Bukti Surat

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat menurut Prof. Mr. A. Pitlo adalah “pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan isi pikiran”. Sedangkan Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”, (Teguh Samudera, 2004:36).

Alat bukti surat telah diatur di dalam Pasal 138, Pasal 165, Pasal 167 HIR, pasal 164, dan pasal 285 sampai dengan Pasal 305 R.Bg. Stbl.1867 No. 29 dan Pasal 1867-1894 BW, serta Pasal 138-147 RV. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (Ishaq, 2010:150).

Dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat (Teguh Samudera, 2004:37), yaitu:

- a. Akta otentik,
- b. Akta di bawah tangan, dan
- c. Surat bukan akta.

Prof. Mr.A. Pitlo berpendapat bahwa “Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagi bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat” sedangkan Dr. Sudino Mertokusumo S.H., berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Teguh Samudera, 2004:37-38).

1) Akta Otentik

Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHP Perdata yaitu suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta dibuat (M.Yahya Harahap, 2011:566).

Pasal 165 H.I.R memuat suatu definisi apa yang dimaksud dengan akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut “akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”, (Ny. Retnowulan Sutantio, 2009:65).

Adapun syarat-syarat akta autentik itu ada 3 (tiga) macam, (Ishaq, 2010:151) yaitu:

1. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
2. Dibuat dalam bentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk.
3. Dibuat di tempat di mana pejabat itu berwenang untuk menjalankan tugasnya.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian (Ny. Retnowulan Sutantio, 2009:67-68), yakni:

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

2) Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian tetapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Contohnya, yaitu surat-surat jual beli yang dibuat tidak di hadapan pejabat umum dan kuitansi.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah sama dengan akta otentik apabila isi dan tanda tangan diakui oleh pihak lawan. Hanya dapat disingkirkan apabila isinya bertentangan dengan hukum, ada unsur paksaan dalam pembuatannya, atau ada penipuan (Ishaq, 2010:152).

Akta di bawah tangan adalah suatu surat tertulis yang dibuat sendiri oleh para pihak atas kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh para saksi. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris (Sarwono, 2011:247).

3) Surat Bukan Akta / Surat Biasa

Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai pembuktian dikemudian hari. Oleh karena itu, surat-surat demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian di sini ialah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan ataupun dapat dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak dipercaya (Teguh Samudera, 2004:54).

b. Bukti Saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya-mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Dalam suasana hukum adat dikenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang menjadi persoalan, dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut (Ny. Retnowulan Sutantio, 2009:70).

Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan (Teguh Samudera, 2004:59) bahwa:

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan

Dengan demikian keterangan yang dikemukakan oleh saksi itu harus dengan hal-hal tentang peristiwa atau kejadian yang dilihat atau dialami sendiri. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian (kejadian-kejadian) itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, akan tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan karena hal itu adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji, bahwa ia akan wajib menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut pasal 242 K.U.H.Pidana (Ny.Retnowulan Sutantio,2009: 70).

Menurut hukum adat saksi harus terdiri dari orang yang sudah mandiri, sudah hidup berumah tangga sendiri, berfikiran sehat dan tahu membedakan yang baik dan yang buruk. Disamping para saksi yang dapat menerangkan berdasarkan pengalaman, penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya, untuk perkara warisan diperlukan juga adanya saksi ahli, yaitu saksi yang diminta oleh para pihak berperkara atau oleh Hakim dari para pemuka adat para pihak berperkara atau cendekiawan atau sarjana hukum adat, yang mengenal hukum adat setempat (H. Hilman Hadikusuma, 2003:122).

c. **Bukti Persangkaan**

Alat bukti persangkaan merupakan alat bukti urutan ketiga menurut ketentuan Pasal 164 HIR, dan Pasal 1886 KUH Perdata.

Dalam kamus hukum alat bukti ini disebut *vermoeden* yang berarti dugaan atau presumptive, berupa kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui (M.Yahya Harahap, 2011:684).

Namun dalam hukum adat yang dimaksud petunjuk atau dugaan bukan saja berupa kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui kearah peristiwa yang belum diketahui (pasal 1915 KUH Perdata) tetapi juga berupa tanda kearah kebenaran sesuatu masalah (H. Hilman Hadikusuma, 2003:123).

Persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata berbunyi *persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal*. Dari ketentuan ini jelas bahwa persangkaan itu hanyalah kesimpulan belaka dari ketentuan undang-undang atau hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas kepada peristiwa yang belum jelas.

Dengan demikian, persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti lain, atau merupakan uraian hakim dengan mana hakim menyimpulkan dari fakta yang terbukti kearah yang belum terbukti (Ishaq, 2011:157).

Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas, dengan lain perkataan terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun juga. Pada umumnya apabila hanya ada satu persangkaan hakim saja, maka persangkaan tersebut tidaklah dianggap cukup untuk menganggap dalil yang bersangkutan itu terbukti, dengan lain perkataan persangkaan hakim itu baru merupakan bukti lengkap, apabila saling berhubungan dengan persangkaan-persangkaan hakim lain yang terdapat dalam perkara itu (Ny, Retnowulan Sutantio, 2009:78).

d. Bukti Pengakuan

Yang dimaksud dengan pengakuan baik HIR maupun KUH Perdata tidak merangkan lebih lanjut, perihal pengakuan oleh HIR diatur dalam pasal-pasal 174, 175, dan 176 sedangkan dalam KUH Perdata diatur pada pasal 1923-1928.

Prof. MR. A. Pitlo memberikan batasan tentang pengakuan (Teguh Samudera, 2004:83) yaitu:

“pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebahagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan”.

Pengakuan ialah berupa keterangan atau isyarat yang dikemukakan, diakui dan dibenarkan oleh para pihak berpekara

dihadapan hakim, baik pengakuan itu diucapkan, ditulis atau dibenarkan oleh para pihak dengan langsung atau dengan perantaraan kuasanya (H.Hilman Hadikusuma, 2003:120).

Alat bukti pengakuan dalam acara perdata apabila pihak tergugat atau lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Namun, jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan seseorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan terjadinya suatu peristiwa hukum disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus dapat membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau saksi yang melihat dan mendengar terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara (Sarwono, 2011:273).

Ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, ialah:

1. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang;
2. Pengakuan yang dilakukan di luar pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 174 H.I.R bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, baik pun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Sebaliknya dalam pasal 175 H.I.R diatur perihal pengakuan yang dilakukan diluar sidang yang berbunyi, bahwa

diserahkan kepada pertimbangan dan awasan hakim, akan menentukan kekuatan mana akan diberikannya kepada suatu pengakuan dengan lisan dengan diperkuat di luar hukum.

Dengan demikian pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sedangkan mengenai pengakuan di luar sidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan kata lain perkataan merupakan bukti bebas. Hal ini, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian, atau pula, hanya menganggap sebagai bukti permulaan (Ny. Retnowulan Sutantio, 2009:80-81).

e. Bukti Sumpah

Yang dimaksud dengan sumpah oleh HIR maupun KUH Perdata tidak diberikan definisi. Undang-undang hanya mengatur tentang sumpah pada pasal-pasal 155-158 dan 177 HIR dan pasal 1929-1945 KUH Perdata (Teguh Samudera, 2004:95).

Alat bukti sumpah adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang di muka hakim untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara. Dalam pengucapan sumpah di muka hakim umumnya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh seseorang yang akan disumpah karena pengucapan sumpah yang disesuaikan dengan agama atau keyakinannya di maksudkan agar yang bersangkutan setelah disumpah dapat memberikan keterangan yang jujur terhadap terjadinya peristiwa hukum

yang didengar, dialami dan dilihatnya secara langsung tanpa adanya unsur kebohongan (Sarwono, 2011:279).

Sumpah adalah jalan terakhir untuk membuktikan sesuatu agar kebenaran yang dinyatakan tidak diragukan lagi. Sumpah boleh diminta oleh Hakim terhadap para pihak yang berperkara atau para saksi atau diminta sendiri oleh para pihak yang berperkara sendiri (H.Hilman Hadikusuma, 2003:124).

Yang dimaksud dengan sumpah oleh HIR maupun KUH Perdata tidak diberikan definisi. Undang-undang hanya mengatur tentang sumpah pada pasal-pasal 155-158 dan 177 HIR dan pasal 1929-1945 KUH Perdata.

Ada 2 macam sumpah, ialah sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karenanya, keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan benar, dan bahwa orang yang disumpah tidak akan berani berbohong, oleh karena apabila ia memberikan keterangan yang berbohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa (Teguh Samudera, 2004:95).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan ini, maka penulis memilih lokasi di kabupaten Tana Toraja khususnya di Pengadilan Negeri Makale dan di dalam masyarakat. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan, bahwa lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Makale dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Tana Toraja.
2. Data sekunder yakni data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi serta literatur-literatur yang dikumpulkan penulis maupun yang terdapat pada Pengadilan Negeri Makale serta yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian langsung di Pengadilan Negeri Makale dan di dalam masyarakat Tana Toraja dengan mengumpulkan data baik hasil wawancara, laporan atau dokumen yang relevan dengan penulisan ini.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan di bahas.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Tana Toraja

Tana Toraja adalah sebuah nama daerah yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai dari 280 Km sampai dengan 355 Km dari sebelah Utara ibu kota Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° Bujur Timur, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km² persegi atau sekitar 5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua (2) kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 dan 206,76 atau luas kedua kecamatan tersebut, merupakan 20, 35% dari seluruh wilayah Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Toraja Utara dan Propinsi Sulawesi Barat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat

Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kabupaten yang termasuk daerah aliran sungai (DAS) Sungai Saddang yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan.

1. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25 %. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara < 300 m → 2.500 m diatas permukaan laut, dengan rincian sebagai berikut:

1. 5.063,79 Ha pada ketinggian < 300 m = 2,44 %
2. 11.808,06 Ha pada ketinggian 300 m – 500 m = 5,69 %
3. 72.888,59 Ha pada ketinggian 500 m - 1000 m = 35,12 %
4. 69.342,94 Ha pada ketinggian 1000 m – 1500 m = 33,41 %
5. 29.644,43 Ha pada ketinggian 1500 m – 2000 m = 14,28 %
6. 17.565,65 Ha pada ketinggian 2000 m – 2500 m = 8,46 %
7. 1.237,14 Ha pada ketinggian diatas 2500 m = 0,60 %

Bagian terendah daerah kecamatan Bonggakaradeng, sedangkan daerah tertinggi kecamatan Rindingallo dengan temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15° c – 18° c dengan kelembapan udara antara 82-86%.Curah hujan 1500 mm/th sampai dengan lebih dari 3500 mm/th.

Keadaan geologi Tana Toraja lebih banyak dipengaruhi oleh formasi bebatuan dari Gunung Latimojong dengan mencakup luas wilayah sekitar 1.565,69 Ha atau 48,84% yang terdiri dari jenis bebatuan *soprin* coklat kemerah-merahan, *soprin napalan* abu-abu, batu gamping dan batu pasir *kwarsit*, serta *gradorir diorir*, dan lain sebagainya. Jenis tanah di

Tana Toraja berupa tanah *alluvial* kelabu, *brown forest*, *mediteran* dan *podsolit* merah kuning.

2. Administrasi

Secara administratif sejak 26 desember 2008, kabupaten Tana Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale dan Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kota Rantepao.

Wilayah pemerintahan Tana Toraja Pasca pemekaran terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sanggalla, Sanggalla Selatan, Sanggalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale Selatan, Saluputti, Bittuang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, Rantetayo, Kurra.

Luas wilayah kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 yang terdidri dari 19 (sembilan belas) kecamatan. Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan 2 (dua) kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,74 Ha dan 206,76 Ha atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35% dari seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja sedangkan kecamatan Makale Utara merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 26,08 atau 1,27% dari luas wilayah kabupaten Tana Toraja.

3. Kependudukan

Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Penataan ini dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam satu wilayah menjadi satu desa yang disebut *Lembang*. *Lembang* sebagai pengganti istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, dimana pemerinyahannya dilaksanakan oleh *Kepala Lembang* (kepala desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasehat. Kepala *lembang* ini pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat.

Mata pencaharian penduduk di kabupaten Tana Toraja umumnya adalah bertani. Usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak dan usaha tani tanaman perkebunan dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan artinya dalam satu rumah tangga biasanya dilakukan ketiga usaha tani tersebut. Hal ini disebabkan karena hasil ketiga usaha tani tersebut misalnya vanili, kopi, beras, kakao, cengkeh, kerbau, babi dan ayam dibutuhkan dalam berbagai upacara ritual masyarakat Toraja setiap tahunnya.

Jumlah penduduk di kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah 240.249 jiwa yang tersebar pada masing-masing desa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jenis kelamin perempuan, yang masing-masing 122.454 jiwa penduduk laki-laki dan 117.795 jiwa penduduk perempuan di kabupaten Tana Toraja. Kecamatan Mengkendek merupakan paling padat penduduknya, dengan jumlah

penduduk 31.439 jiwa dan kecamatan masanda merupakan yang paling kecil penduduknya, dengan jumlah penduduk 5.595 jiwa.

4. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat Toraja pada mulanya tidak mengenal Toraja sebagai nama suku, mereka sejak dulu menyadari akan kesatuan mereka sebagai satu etnis dari satu keturunan yang disebut *to untongkonni lili'na lepongan bulan to unnisungngi gonting na matari' allo*, yang artinya orang yang mendiami wilayah yang bulat dalam cakupan bulan dan matahari. Biasa juga disebut *to basse lepongan bulan matari' allo* artinya orang yang berikrar sebagai suatu persekutuan dalam suatu wilayah yang bulat yang dilindungi bulan dan matahari.

Nama Toraja mulai dikenal saat *tondok lepongan bulan tana matari' alloini* mulai berinteraksi dengan daerah lain khususnya daerah Bugis Luwu dan Sidenreng. Asal kata Toraja sendiri mempunyai berbagai pemahaman, menurut orang Bugis Luwu bahwa Toraja berasal dari kata *Torajang* yang berarti orang dari barat, karena Toraja memang terletak di sebelah barat Luwu. Menurut orang Bugis-Sidenreng, Toraja berasal dari kata *Toraja*, *To* artinya orang sedangkan *Riaja* artinya bagian atas pegunungan, karena daerah Toraja memang merupakan daerah pegunungan yang lebih tinggi dari daerah Luwu dan Sidenreng (L.T Tangdilintin, 1985:13).

Sebagaimana halnya dengan lingkungan masyarakat adat lainnya di Indonesia yang mengenal stratifikasi keturunan dalam masyarakat,

maka masyarakat Tana Toraja mengenal juga adanya stratifikasi tersebut. Stratifikasi keturunan atau susunan tingkatan keturunan dalam masyarakat Tana Toraja terbagi dalam 3 (tiga) lingkungan masyarakat adat yang lebih kecil berdasarkan *Lesoan Aluk* (aturan dan cara pelaksanaan agama), yang masing-masing lingkungan tersebut mempunyai tingkatan tertinggi yang berbeda namanya serta terdapat juga variasi perbedaan lapisan masyarakatnya.

Di lingkungan masyarakat *Tallu Lembangna* (Makale, Mengkendek, Sanggalla) dan Rante Bua' serta Sa'dan Balusu golongan tertinggi adalah golongan *Puang*. Pada lingkungan masyarakat Toraja bagian barat adalah *Ma'dika*, sedangkan pada Toraja bagian utara golongan tertinggi adalah golongan *Tomakak Matasak* yang bergelar *Sindo'* untuk perempuan dan *Siambe'* untuk laki-laki.

Saat ini di Tana Toraja terdapat 5 (lima) macam agama yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha. Walaupun mereka sudah menganut agama Kristen, Islam, Hindu dan Budha masih saja ada yang menggabungkan kepercayaan agama-agama tersebut dengan kepercayaan peninggalan nenek moyang terkadang berbau mistis.

Pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran *Aluk Todolo*, baik upacara *Rambu Tuka'* (rambu=asap, tuka'=naik) biasa juga disebut *Aluk Rampe Matallo* (aluk=upacara, rampe=bagian, matallo=tempat matahari terbit) artinya

upacara kegembiraan, upacara kesenangan (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari, maupun upacara *Rambu Solo'* (rambu=asap, solo'=turun) yang biasa juga disebut *Aluk Rampe Matampu'* (matampu'=tempat matahari terbenam) artinya upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore hari.

Rambu Solo' adalah upacara pemakaman adat Tana Toraja. Pada upacara ini biasa terjadi kesalahan istilah yang mengatakan pesta orang mati di Tana Toraja, hal ini tidak dibenarkan karena *Rambu Solo'* itu bukan pesta tetapi upacara kedukaan. Leluhur menyebutnya dengan istilah *rambu solo'* yang artinya hati yang sedang menurun karena penuh duka dan sedih ratapan keluarga.

Rambu Solo' sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja dilaksanakan atas pemahaman leluhur (*dandanan sangka'*) pada masa lampau dan hingga kini ternyata masih diikuti oleh orang Toraja yang sudah memeluk agama lain yang sudah dibenarkan oleh ideologi Pancasila di Indonesia. Begitu luasnya kegiatan *Rambu Solo'* itu dilaksanakan oleh orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, cucu, cicit secara berkesinambungan dan tidak boleh terputus.

B. Harta Warisan dalam Masyarakat Tana Toraja

Berdasarkan hasil penelitian di dalam masyarakat adat Tana Toraja mereka mengenal berbagai macam harta warisan yang dibedakan atas:

1. **Mana' (Harta Pusaka)**

Yaitu warisan yang mempunyai nilai magis religius. *Mana'* ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:

a. **Mana' Disiossoi**

Mana' Disiossoi (harta pusaka tinggi) artinya harta yang tidak dapat dibagi pengusaannya dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi'* ini terbagi menjadi 2 (dua).

- 1) *Mana' Kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan berupa kedudukan adat yaitu warisan yang berupa jabatan masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya misalnya *to parengge'* (pemangku adat) dalam suatu wilayah pemerintahan lembang yang berfungsi untuk mengawasi *aluk* yang berlaku di masyarakat pada saat upacara pemujaan (rambu tuka'), *anak to patalo* (pemangku adat) sebagai penentu pengambilan keputusan apabila *to parengge'* tidak bisa memutuskan suatu masalah dalam masyarakat.
- 2) *Mana' barang apa* (warisan fisik) artinya warisan yang berupa harta benda, misalnya *banua tongkonan layuk* (rumah adat), *padang rante* (tempat para bangsawan melakukan upacara adat), *doke* (tombak), *gayang* (keris), *kandaure* (manik-manik), *ma'a* (kain) dan lain-lain.

Semua harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

b. *Mana ba'gi*

Mana ba'gi (harta pusaka rendah) yaitu harta yang berasal dari lapisan di atas ayah dan ibu, juga harta pencaharian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan ahli warisnya, misalnya sawah, emas, dan lain-lain. Ada juga harta pusaka rendah yang tidak dapat dibagi dilihat dari fungsinya dan kesepakatan dari ahli waris misalnya *banua tongkonan* berfungsi sebagai tempat untuk menyatukan keluarga, *kandaure* dapat dipakai secara bersama pada saat pelaksanaan upacara *rambu solo'* maupun *rambu tuka'*.

2. *Daga' tang disibali* atau *ba'gi* (harta asal/ harta bawaan)

Yaitu harta yang dibawa isteri atau suami ke dalam perkawinan atau harta yang bukan didapat dari hasil jerih payah dalam perkawinan tetapi merupakan suatu pemberian atau warisan yang diterima dari orang tua sebelum atau setelah perkawinan.

3. *Torakna rampanan kapa'* atau *daga' disibali* (harta bersama)

Yaitu harta yang diperoleh suami dan isteri di dalam perkawinan, harta bersama ini juga merupakan objek warisan dari para ahli waris baik selaku anak kandung maupun selaku anak angkat. Di masyarakat Tana Toraja harta bersama ini adalah harta warisan yang wajib diperoleh anak angkat.

Sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Tana Toraja tidak berlaku terhadap semua objek harta warisan, karena di Tana Toraja dikenal juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi (*mana' disiosoi'*) di Toraja cara pewarisannya cenderung lebih kepada sistem pewarisan kolektif. Contohnya rumah *Tongkonan*, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah (*mana ba'gi*), penguasaan dan kepemilikannya dapat dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

C. Kedudukan Anak Angkat (*Anak Dibuang Tama Tambuk*) Dalam Memperoleh Harta Warisan Di Tana Toraja

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak di Tana Toraja tidak memutuskan hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) juga tetap masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya. Perbedaan keyakinan antara orang tua angkat dengan calon anak angkat tidak menjadi persoalan karena tujuan umum dari pengangkatan anak di Tana Toraja adalah untuk melaksanakan upacara penguburan seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa masyarakat Toraja memiliki pandangan bahwa semakin banyak anak maka akan semakin banyak pula *toding* (kerbau) yang akan ikut dikorbankan pada saat upacara *rambu solo'* (kematian). Namun hal ini berbeda seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat 3 menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkatnya.

Anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) di Tana Toraja tetap mewaris dari orang tua angkatnya dan juga orang tua kandungnya yang biasa disebut *ma'bubun dua ma'saruran patomali*, artinya mempunyai dua sumber mata air yaitu bisa mewaris dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya.

Hak mewaris anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) terhadap harta warisan orang tua angkatnya yaitu jika pewaris tidak mempunyai anak kandung (mandul) maka akan ditentukan oleh keluarga dekat atau ahli waris lain dengan melihat hal-hal yang telah dilaksanakan oleh anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya dan tongkonan orang tua angkatnya. Namun jika pewaris memiliki anak kandung maka baik yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan akan ditentukan oleh musyawarah antara anak angkat dan anak kandung yang sah (hasil wawancara Paulus Pasang Kanan, selaku tokoh masyarakat, tanggal 7 Maret 2013, Tana Toraja).

Paulus Pasang Kanan selanjutnya mengatakan bahwa kedudukan anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) di Toraja dalam memperoleh harta warisan disesuaikan dengan besarnya pengorbanan anak angkat terhadap kewajiban-kewajibannya terhadap orang tua angkatnya. Adapun

kewajiban-kewajiban anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) yang dimaksud adalah:

1. Harus memelihara dan memperhatikan orang tua angkatnya.
2. Ikut serta dalam upacara penguburan orang tua angkatnya yang biasa disebut sebagai *to masara'*.
3. Harus ikut turut serta *mangngiu'* atau turut ambil bagian apabila orang tua angkatnya melaksanakan upacara baik *rambu tuka* (upacara syukuran) maupun *rambu solo'* (upacara kematian)
4. Harus ikut *mangngiu'* terhadap tongkonan orang tua angkatnya baik dalam hal pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Pengangkatan anak di Tana Toraja pada umumnya diberikan tanda yang disebut *ditekkenni* atau ada pula yang menyebutnya *di ba'gi*. *Ditekkenni* sebagaimana telah dikemukakan diatas yaitu pemberian harta kekayaan atau warisan secara langsung dari pewaris kepada warisnya saat pewaris masih hidup. Dengan kata lain *ditekkenni* adalah pemberian warisan dengan cara hibah. Hal ini biasanya diberikan sebagai lambang bahwa anak tersebut resmi diangkat menjadi anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) oleh orang tua angkatnya. Harta ini merupakan harta yang tidak dapat diambil kembali oleh ahli waris lainnya karena dianggap sebagai sebuah *siri'* , kecuali jika anak angkat tersebut dengan sengaja sudah tidak mau melakukan kewajiban-kewajibannya seperti yang yang sudah disebutkan diatas. Paulus Pasang Kanan juga mengatakan bahwa bisa saja anak angkat tidak ikut melakukan pengorbanan di dalam

upacara penguburan jika betul-betul tidak mampu, hal ini disebabkan karena bisa saja anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) sudah melakukan kewajiban-kewajiban lainnya seperti telah merawat orang tua angkatnya dan ikut ambil bagian dalam mangingiu' di upacara rambu tuka' atau rambu solo' yang dilaksanakan orang tua angkatnya selama masih hidup. Tetapi sepanjang dia mampu dan tidak melaksanakannya maka harta itu bisa saja ditarik kembali. Jika terjadi hal seperti ini diambilnya kembali warisan atau *tekken* maka hubungan kekerabatan dengan orang tua angkat atau kerabat orang tua angkatnya dianggap putus.

Upacara penguburan di Tana Toraja dianggap sebagai penghormatan terakhir terhadap orang yang meninggal. Selain itu upacara penguburan dianggap sebagai lambang atau status sosial seseorang. Oleh karena itu jarang ditemui di dalam masyarakat Tana Toraja seorang anak tidak melakukan pengorbanan pada upacara penguburan orang tuanya sama pula dengan anak angkat terhadap orang tua angkatnya, bahkan mereka akan mengadaikan harta berharga mereka seperti sawah dan kebun apabila mereka tidak mampu membeli kerbau untuk melaksanakan upacara adat sesuai dengan strata sosialnya mereka.

Pengangkatan anak di Tana Toraja sama halnya dengan pengangkatan anak pada masyarakat umumnya yaitu bisa diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Anak angkat yang diambil dari keluarga dekat dari orang tua angkatnya berhak atas semua

harta warisan orang tua angkatnya, baik harta asal, harta pusaka rendah, harta pencarian bersama dan bahkan berhak menyimpan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi kepemilikannya jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung yang sah. Namun jika pewaris mempunyai anak kandung yang sah maka harta warisan yang dapat diwariskan kepada anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) adalah hanya harta pencaharian bersama.

Menurut hukum adat Tana Toraja dalam menetapkan status *kepemilikan* harta pusaka, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah harus menuturkan atau menjelaskan silsilah harta itu berasal dan mencari tahu siapa yang berhak atas harta pusaka tersebut. Jadi jika anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) diambil dari luar kalangan keluarga maka anak angkat hanya berhak atas harta pencaharian bersama orang tua angkatnya, namun jika anak angkat diambil dari kalangan keluarga sendiri maka bisa saja dia mewaris dari harta pusaka orang tua angkatnya.

Menurut Pong Semu' yang juga merupakan seorang tokoh adat menyatakan bahwa masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Musyawarah keluarga masih diterapkan dalam menyelesaikan suatu persoalan, meskipun kadang tidak menghasilkan suatu keputusan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga pada akhirnya mereka membawa perkara mereka ke pengadilan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan anak angkat

(*anak dibuang tama tambuk*) berhak atas semua harta warisan orang tua angkatnya tergantung dari putusan musyawarah keluarga orang tua angkatnya, terlebih hal ini bisa terjadi apabila anak angkat (*anak dibuang tama tambuk*) telah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anak angkat terhadap *tongkonan* orang tua angkatnya (hasil wawancara dengan Pong Semu', selaku tokoh masyarakat, tanggal 8 Maret 2013).

Pong Semu' juga mengatakan bahwa seorang anak angkat tetap mempunyai hak untuk tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya meskipun sudah diangkat anak oleh seseorang. Namun upacara penguburan tetap mempunyai peranan dalam menentukan besar kecilnya harta warisan yang diterima tergantung dari besar kecilnya pengorbanan anak angkat terhadap *tongkonan* orang tua kandungnya.

**D. Pertimbangan Hakim Dalam Prosedur Pembuktian Sengketa
Kedudukan Anak Angkat (Anak Dibuang Tama Tambuk) Dalam
Memperoleh Harta Warisan pada Pengadilan Negeri Makale**

Berdasarkan hasil penelitian pengangkatan anak sering menimbulkan persoalan khususnya dalam hal pewarisan. Persoalan tersebut terjadi pula dalam pengangkatan anak di Tana Toraja. Kedudukan anak angkat dan anak kandung dalam memperoleh harta warisan. Persoalan lain yang menjadi masalah adalah karena sebagian besar pengangkatan anak dilakukan secara adat serta sah atau tidaknya anak dikatakan anak angkat menjadi pokok dalam persoalan pembagian warisan dalam pengangkatan anak di Tana Toraja. Persoalan seperti ini

muncul ketika anak angkat telah meninggal dan keturunan-keturunan mereka tidak mengetahui asal usul mengenai harta warisan yang mereka punya. Jika terjadi persoalan seperti ini maka pihak-pihak yang berperkara akan menyelesaikannya dengan dengan musyawarah keluarga atau musyawarah adat. Pada umumnya penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, tetapi menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai. Namun jika upaya ini tidak berhasil maka pihak-pihak yang berperkara akan membawa persoalan mereka ke pengadilan.

Salah satu kasus sengketa warisan tentang *anak dibuang tama tambuk* (anak angkat) terjadi di Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Kasus perdata dengan putusan No. 59/ Pdt. G/ 2009/ PN.Mkl terjadi antara pihak L. S. Tangaran sebagai Penggugat yang merupakan anak dari Sanda MELAWAN Markus Misi' Sanggalangi', S.H sebagai Tergugat I, Drs. Paulus Karaeng sebagai Tergugat II dan Adi' sebagai Tergugat III dimana tergugat II dan III merupakan anak angkat dari LAI SEWA.

Adapun duduk perkara dalam sengketa ini adalah berawal dari sawah-sawah obyek sengketa yaitu sawah To'Bulala beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To'Bulala sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan luas secara keseluruhan 2.600 M2 sebagai obyek sengketa I dan sawah Bue' dengan luas 3.500 M2 sebagai obyek sengketa II yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte

Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja yang pada mulanya sawah-sawah obyek sengketa adalah sawah yang dikuasai dan dimiliki LAI' INE yang mempunyai anak kandung satu-satunya bernama LAI' SEWA dan anak angkat satu-satunya bernama SANDA ayah kandung dari Penggugat. Bahwa LAI' INE bersaudara kandung dengan Limbong dan semasa hidupnya LAI' INE kawin dengan PAPA dan melahirkan anak bernama LAI' SEWA sebagai anak satu-satunya. Namun karena LAI' SEWA adalah anak satu-satunya dari LAI' INE dengan PAPA tersebut maka oleh LAI' INE memohon kepada saudaranya yang bernama LIMBONG agar berkenan memberikan anaknya yang bernama SANDA untuk dijadikan anak angkat secara adat toraja yang sama kedudukan dan derajatnya dengan anak sah dari orang tua angkatnya dalam hukum Adat Toraja di sebut *Anak dibuang tama tambuk* yang beri tanda yang disebut dalam hukum Adat Toraja *di Tekkenni*.

Penggugat mengakui bahwa sawah-sawah obyek sengketa tersebut merupakan *tekken* orang tuanya dari orang tua angkatnya, jadi dengan demikian penggugat sebagai anak menjadi ahli waris yang sah yang berhak atas kepemilikan sawah obyek sengketa I dan sawah obyek sengketa II. Namun dengan sengaja perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa I, Tergugat II yang memberikan sawah obyek sengketa I kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat III yang menguasai sawah obyek sengketa II dan mengakui obyek sengketa tersebut sebagai miliknya adalah semuanya perbuatan melawan hukum. Berbagai upaya

telah dilakukan oleh penggugat untuk mendapatkan haknya namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah untuk damai tidak dapat tercapai, sehingga penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Makale.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolute (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan (Yahya Harahap, 2011:496).

Menurut Boni Daniel bahwa, pembuktian adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara di depan hakim dalam persidangan di pengadilan dengan mengajukan bukti-bukti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan (wawancara Boni Daniel, hakim PN Makale, 4 Maret 2013).

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana adalah dengan memperhatikan alat-alat pembuktian yang diajukan. Mengenai alat-alat pembuktian itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita temukan pada pasal 164 (pasal 1866 KUH Perdata) yang berbunyi, maka yang disebut bukti, yaitu

1. Bukti Surat,
2. Bukti Saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah

Dalam putusan perkara perdata dengan No. 59/ Pdt.G/2009/ PN.Mkl bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama tentang Surat Gugatan Penggugat, demikian pula dengan Jawaban, Replik, dan Duplik yang diajukan oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat yaitu:

1. Bagaimanakah asal usul tanah sengketa yaitu Sawah To'Bulala' dan Sawah Bue', yang terletak di Kampung Ratte Talongnge, Lembang Ratte Talongnge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, apakah sawah-sawah tersebut awalnya dikuasai dan dimiliki oleh INE yang kawin dengan PAPA yang kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama LAI SEWA dan angkat angkat INE dan PAPA yaitu SANDA kemudian melahirkan penggugat atau tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik para Tergugat yang diperoleh karena perolehan secara turun temurun, dimana Tergugat I adalah keturunan dari Tongkonan Talongnge Diongngan dan Sawah To' Bulala' tersebut berasal dari Tongkonan Talongnge Diongngan, dan

Tergugat II serta Tergugat III adalah anak angkat sah dari LAI SEWA dimana Sawah Bue' adalah harta bawaan dari PAPA yang berasal dari Tongkonan Talongnge Tangnga, sedangkan INE bukan berasal dari Tongkonan Talongnge Tondok Tangnga;

2. Apakah penguasaan atas tanah obyek sengketa sekarang oleh Tergugat I, II, dan III adalah perbuatan yang melawan hukum;

Dalam perkara perdata dengan putusan No.59 / Pdt.G/ 2009/PN.Mkl bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hibah dari LAI' SEWA kepada SANDA tertanggal 9 Mei 1981, yang diberi tanda P-1.
2. Foto copy surat keterangan Penggarap yang dibuat oleh Kepala Lembang Ratta Talonge No. 16/LRT/SP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009, yang diberi tanda P-2.
3. Foto copy SPPT PBB No. 73.18.050.023.009.0041.0 tahun 2006 luas 2.620 M2 atas nama L.S. Tanggaran dengan obyek pajak sawah To'Bulala", terletak di Lingkungan Talonge, yang diberi tanda P-3.
4. Foto copy SPPT PBB No. 73.18.050.023.009.0041.0. tahun 2007 luas 2.620 M2 atas nama L.S.Tanggaran dengan obyek

pajak sawah To'Bulala', terletak di Lingkungan Talonge, yang diberi tanda P-4.

5. Foto copy SPPT No. 73.18.050.023.0116. tahun 2007 luas 2.650 M2 atas nama LAI' SEWA' dengan obyek pajak sawah Bue, terletak di Ratte Talonge, yang diberi tanda P-5.
6. Foto copy SPPT PBB No. 73.18.050.023.0116. tahun 2005 luas 2.650 M2 atas nama LAI' SEWA' dengan obyek pajak sawah Bue, terletak di Ratte Talonge yang diberi tanda P-6.
7. Foto copy SPPT PBB No. 73.18.050.023.0116. tahun 2004 luas 2.650 M2 atas nama LAI' SEWA dengan obyek pajak sawah Bue, terletak di Ratte Talonge, yang diberi tanda P-7.
8. Foto copy SPPT PBB No. 73. 18.050.023.0116. tahun 2001 luas 2.650 M2 atas nama LAI' SEWA dengan obyek pajak sawah BUe', terletak di Ratte Talonge, yang diberi tanda P-8.
9. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan No. Pol : STTL/ 61/II/2009/SPK POLRES TANA TORAJA tertanggal 18 Februari 2009 atas nama L.S. Tanggaran sebagai tindak Pidana Penyerobotan.

Kemudian sebaliknya, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy surat pernyataan tertanggal 21 Juli 2009 yang dibuat oleh A.M. RERUNG, yang diberi tanda T.I.II.III-1.
2. Foto copy surat keterangan dari Kepala Kelurahan Malimbong tertanggal 3 Februari 2010 No. 33/KM/II/2010, yang diberi tanda T.I.II.III-2.
3. Foto copy surat keterangan dari Kepala Kelurahan Malimbong tertanggal 3 Februari 2010 No. 33/KM/II/2010, yang diberi tanda T.I.II.III-3.
4. Foto copy surat keterangan alamat sawah dari Kepala Lembang Ratte Talonge tertanggal 3 Februari 2010 No. 14/LRT-SP/II/2010, yang diberi tanda T.I.II.III-4.
5. Foto copy surat izin potong hewan pada acara adat penguburan alm. MARIA SEA' dari Camat Malimbong Balepe' tanggal 15 November 2008 No. 973/28/MB/XI/2008, yang diberi tanda T.I.II.III-5.

Dalam kasus perdata dengan putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl menerangkan bahwa selain Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana sebagaimana tersebut diatas penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu: 1. RESA, 2. FRANSISCUS DATU LAYUK, 3. ARIS TONGLO, 4. YOHANIS A. SIRENDEN, dan 5. YOHANIS LEMBANG yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya.

- RESA menerangkan bahwa dia tidak tahu siapa pemilik dari obyek sengketa I dan II, tidak mengetahui Sanda diberi hibah oleh INE dan mendengar bahwa waktu LAI' SEWA' meninggal L.S Tanggaran (Penggugat) ikut berkorban 1 ekor kerbau.
- FRANSISCUS DATU LAYUK menerangkan bahwa dia tidak tahu siapa pemilik kedua sawah obyek sengketa, bahwa hubungan SANDA dengan LAI' SEWA dianggap bersaudara namun waktu SANDA diambil INE dia tidak mengetahui apakah ada upacaranya dan dia tidak tahu apakah SANDA memotong kerbau pada saat INE meninggal dunia.
- ARIS TONGLO menerangkan bahwa dia tidak tahu siapa pemilik sawah obyek sengketa tetapi pada tahun 1958 yang mengelolanya adalah SANDA dan tidak pernah mendengar SANDA diangkat anak oleh INE.
- YOHANIS A. SIRENDEN menerangkan bahwa obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Talonge, bahwa dia tidak mengetahui apakah SANDA diangkat anak oleh INE tetapi mengetahui setelah membaca surat hibah yang diperlihatkan oleh SANDA
- YOHANIS LEMBANG menerangkan bahwa dia tidak tahu siapa pemilik kedua obyek sengketa tersebut, tidak tahu apakah SANDA diangkat anak oleh INE dan tidak tahu apakah SANDA ikut memotong kerbau pada saat INE dipestakan serta dia menerangkan bahwa Tergugat I dan II dibawa oleh LAI' SEWA

sejak kecil, disekolahkan, dikawinkan dan menjadi penanggung jawab upacara *rambu solo'* LAI' SEWA.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat tersebut yang saling bersesuaian maka telah ditemukan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum bahwa para saksi Penggugat tidak mengetahui asal-usul dan penguasaan obyek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa persesuaian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata.

Selain Penggugat, para Tergugat pun mengajukan pula 6 (enam) orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yaitu: 1. A.M. RERUNG, 2. YOHANIS BULUNG PAYANGAN, 3. DANIEL LEBANG, 4. YOHANIS RANDAN, 5. YOHANIS TANAN BA'BA, 6. SIMON PALEMBANG.

- A.M. RERUNG menerangkan bahwa dia tidak pernah menandatangani surat keterangan penyerahan tanah (hibah) tanggal 9 Mei 1981 dan bahwa LAI' SEWA punya anak angkat yaitu Tergugat II dan Tergugat III serta mengetahui jika Tergugat II memotong 2 ekor kerbau di upacara LAI SEWA karena pada saat musyawarah keluarga saksi hadir dan Tergugat II mengaku dua (2) ekor kerbau.
- YOHANIS BULUNG PAYANGAN menerangkan bahwa LAI SEWA mempunyai tiga anak angkat yaitu Tergugat II, Tergugat

III dan Rerung dan mengetahui bahwa LAI SEWA menyekolahkan Tergugat II sampai sarjana serta saksi mengetahui yang mengawinkan Tergugat II dan III adalah LAI SEWA.

- DANIEL LEBANG menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Tergugat III mengambil padi dirumah Penggugat, bahwa saksi mengambil padi pada tahun 2008 sampai 2009, bahwa pada saat saksi mengambil padi Penggugat tidak keberatan karena Penggugat sendiri yang memberikannya.
- YOHANIS RANDAN menerangkan bahwa SANDA tidak pernah diangkat anak oleh INE dan saksi tidak pernah melihat ada hibah LAI' SEWA kepada SANDA.
- YOHANIS TANAN BA'BA menerangkan bahwa obyek sengketa I adalah milik LAI SEWA dan obyek sengketa II adalah milik PAPA ayah dari LAI SEWA, bahwa saksi tidak mengetahui apakah SANDA diangkat anak oleh INE dan tidak mengetahui jika ada sawah yang dihibahkan kepada SANDA, bahwa waktu LAI SEWA dipestakan Tergugat II dan Tergugat III memotong kerbau sedangkan Penggugat tidak.
- SIMON PALEMBANG menerangkan bahwa obyek sengketa I adalah kepunyaan LIMBONG karena LAI SEWA yang cerita kepada saksi, bahwa waktu upacara *rambu solo'* LAI SEWA Tergugat II yang menjadi penanggung jawab, bahwa saksi

mengetahui bahwa pada saat upacara *rambu solo'* LAI SEWA Penggugat tidak memotong kerbau, bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat II dan Tergugat III sejak kecil dibesarkan dan disekolahkan sampai tamat dan dinikahkan oleh LAI SEWA, bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa karena ditebusnya kepada Tergugat II dan Tergugat III dirumah LAI SEWA pada waktu pemondokan untuk pestanya LAI SEWA, bahwa saksi mendengar Penggugat keberatan atas obyek sengketa atas obyek sengketa I yang ditebus Tergugat I. bahwa orang tidak dapat harta jika tidak ikut memotong kerbau.

Majelis hakim pun bahwa selain apa yang diterangkan oleh saksi-saksi para Tergugat, berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu YOHANIS A. SIRENDEN bahwa asal obyek sengketa adalah dari Tongkonan Talongnge dan Markus Misi (Tergugat I) menggarap sawah tersebut karena ada korban untuk penebusan sawah kepada Tergugat II (Paulus Karaeng), dan menurut saksi YOHANIS LEBANG, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dibawa dan dipelihara Lai' Sewa sejak umur 2 (dua) tahun, disekolahkan, dan dikawinkan oleh Lai' Sewa serta Tergugat II dan Tergugat III potong kerbau waktu upacara adat kematiannya Lai' Sewa sedangkan Penggugat tidak potong kerbau demikian pula anaknya Sanda yang bernama Pandung tidak potong kerbau atau tidak berkorban dalam kematiannya Lai' Sewa sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah pula bersesuaian

dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat mengenai asal-usul dan penguasaan obyek sengketa berasal dari Tongkonan Talongnge Diongan untuk Sawah To' Bulala' dan Sawah Bue' berasal dari Tongkonan Talongnge Tondok Tangnga.

Setelah pemeriksaan suatu perkara di persidangan dianggap *selesai* dan para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lain, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat yaitu mengenai Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hibah dari LAI' SEWA' kepada SANDA tertanggal 9 Mei 1981, menurut majelis hakim bukti surat tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui peristiwa hibah tersebut karena mereka hanya diberitahu dan ditunjukkan ada surat hibah tersebut oleh Sanda maupun Penggugat.

Menurut Boni dalam pembuktian harus ada persesuaian antara alat bukti dengan keterangan saksi-saksi seperti diatur dalam Pasal 1908 *KUHPerdata* dalam penerapannya menjelaskan bahwa bukan hanya terbatas pada saling persesuaian diantara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tetapi meliputi saling persesuaian antara keterangan saksi dengan alat yang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim mempertimbangkan persesuaian saksi-saksi dengan alat bukti surat (wawancara Boni Daniel, selaku hakim PN Makale, tgl 4 Maret 2013).

Majelis hakim mempertimbangkan saksi para Tergugat yang bernama A.M. RERUNG yang namanya tertera dan bertanda tangan didalam Surat Hibah tersebut menerangkan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu yang telah dibuktikan dipersidangan dan oleh karena tanda tangan tersebut dipungkiri oleh salah satu yang bertanda tangan yaitu A.M.RERUNG, maka daya kekuatan formil bukti P.1 tersebut lenyap dan pula mengenai syarat materiil didalam bukti P.1, tersebut ternyata baik persetujuan hukum maupun perbuatan hukum yang terdapat di dalam isi bukti P.1. tersebut tidak didukung oleh saksi-saksi Penggugat dan dibantah pula oleh saksi A.M.RERUNG dari para Tergugat yang memungkiri tanda tangannya maka bukti surat bertanda P.1 tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan bukan merupakan alat bukti yang sah karena para Tergugat berhasil membuktikan bantahannya atas isi maupun tanda tangan bukti tersebut yang bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 537 K/Pdt/1985 serta Pasal 1877 KUHPerdata yang berbunyi:

"Jika seseorang memungkiri atau tanda tangannya, atau pun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan".

Majelis hakim juga menimbang alat bukti tanda P.2 yaitu mengenai Foto copy Surat Keterangan Penggarap yang dibuat oleh Kepala Lembang Ratte Talonge No. 16/LRT/SP/V/2009 yang menurut majelis hakim bahwa bukti P.2 tersebut sama dengan pernyataan yang diberikan

seseorang tanpa ia diajukan sebagai saksi untuk menerangkan kebenaran formil dari surat keterangan tersebut, maka merujuk pula pada Putusan Mahkamah agung R.I Nomor : 3091/ K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 *menyebutkan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*. Kemudian majelis hakim menimbang bahwa bukti surat P.3, P.4, P.5,P.6,P.7 dan P.8 mengenai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) bukanlah mengenai tanda bukti kepemilikan namun sebagai bentuk penguasaan seseorang atas tanah karena ia telah menikmati tanah dan bukti surat yang diberi tanda P.9 mengenai Surat Tanda Terima Laporan No. Pol STTL/61/II/2009/SPK POLRES TANA TORAJA tertanggal 18 Februari 2009 atas nama L.S.TANGARAN sebagai pelapor tindak Pidana Penyerobotan tidak mempunyai relevansi untuk membuktikan kepemilikan dari tanah obyek sengketa .

Di dalam Hukum Acara Perdata, hakim semata-mata terikat pada alat-alat bukti yang sah. Ini yang dikenal dengan istilah "*preponderance of evidence*". Secara harfiah, *preponderance of evidence* dapat diterjemahkan sebagai pengaruh yang lebih besar dari alat bukti atau keterikatan hakim sepenuhnya pada alat bukti (Ahmad Ali, 2008:241).

Boni Daniel menjelaskan bahwa hakim juga harus punya kemampuan berpikir melampaui hukum yaitu kemampuan berfikir dan

bertindak melampaui hukum tertulis tanpa mencederai nilai keadilan. Oleh karena itu di dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Makale hakim wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat karena merupakan salah satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal (5) ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tetapi hakim juga tidak mutlak terikat pada nilai yang berkembang dalam masyarakat apabila tidak memberikan nilai keadilan (wawancara tanggal 4 Maret 2013).

Dalam kasus sengketa perdata No. 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl majelis hakim juga menimbang bahwa Adat yang berlaku di Tana Toraja yaitu mengenai pengorbanan terhadap orang mati dalam upacara adat Rambu Solo' yang akan diperhitungkan hartanya terhadap orang yang berkorban sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1354/ K/Sip/1971 tanggal 14 Januari 1972 yang menyebutkan bahwa *"menurut Hukum Adat Waris Toraja, harta warisan pewaris belum boleh dibagi waris oleh para ahli warisnya sebelum diadakan pengorbanan hewan oleh ahli waris tersebut akan menentukan perbandingan bagian-bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan"*, dan disebutkan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 41/1969/Mkl tanggal 9 Mei 1969 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor : 273/1969/PT/Pdt tanggal 30 September 1971 bahwa *"pengorbanan dari seseorang yang dikeluarkannya pada suatu pesta kematian di Tana Toraja dapat dipertimbangkan pada harta peninggalan orang yang dipestakan itu"*.

Selain itu majelis hakim juga menimbang bahwa Drs. Daniel Tulak dalam bukunya yang berjudul **Kada Disedan Sarong, Bisara Ditoke' Tambane Baka**, yang menyebutkan bahwa upacara Rambu Solo' itu adalah satu satu upacara yang akan menentukan pembagian warisan sawah. Hal ini menyebabkan nilai sawah di Tana Toraja sangat tinggi dinilai dalam jumlah kerbau. **Tidak ada seorangpun anak Toraja memiliki sawah tanpa melalui pemotongan kerbau sesuai adat**, yang diatur oleh To Parengnge' dan Ambe Tondok karena daging itu akan dibagi kepada semua orang didalam kampung/desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-5 adalah mengenai surat izin potong hewan pada acara adat penguburan alm. MARIA SEA' dari Camat Malombong Balepe' tanggal 15 November 2008 No. 973/28/MB/XI/2008 didukung pula dengan keterangan saksi-saksi.

Boni Daniel juga menyatakan bahwa keabsahan Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak angkat dari Lai' Sewa merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:1413 K/Pdt/1988 tanggal 18-5-1990** yang *menyebutkan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkankan oleh orang tua angkatnya*. Hal ini didukung oleh keterangan-keterangan saksi penggugat yang tidak terdapat persesuaian satu dengan yang lain yang dapat menerangkan

asal-usul tanah obyek sengketa, penguasaan secara turun temurun, tidak ada saksi yang tahu mengenai Sanda sebagai anak angkat maupun surat hibah yang dimilkiki Sanda sehingga hal ini tidak sesuai dan mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dimiliki INE (wawancara 4 Februari 2013).

Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya (*judicature rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara, serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Sudikno menerima bahwa yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Yurisprudensi juga dapat berarti putusan pengadilan.

Dalam arti sebagai putusan pengadilan, maka kita dapat membedakan lagi yurisprudensi menjadi dua macam yaitu:

1. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti (*kracht van gewijsde*), yang terdiri dari:
 - 1) Putusan perdamaian (dalam perkara perdata),
 - 2) Putusan pengadilan negeri yang tidak banding,
 - 3) Putusan pengadilan tinggi yang tidak kasasi,
 - 4) Seluruh putusan Mahkamah Agung.

2. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), yaitu putusan hakim selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

Putusan pengadilan disamping sebagai salah satu sumber hukum formal, juga adalah hukum (*judge made law*). Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 1917 BW). Putusan pengadilan senantiasa mengikat berlandaskan asas *Res Judicata Proven ate Habetur*.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama.

Dengan lain perkataan, bukan hanya undang-undang saja yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, sebab putusan pengadilan pun mempunyai kekuatan mengikat, hanya saja perbedaannya yaitu:

1. Kekuatan mengikat undang-undang adalah berlaku umum, sebab undang-undang berisi peraturan-peraturan yang sifatnya abstrak dan tidak tertuju pada orang tertentu.
2. Kekuatan mengikat dan suatu putusan pengadilan hanyalah mengikat para pihak saja dan tidak mengikat hakim lain yang akan memutus perkara atau peristiwa sejenis.

Perbedaan yang kedua ialah tidak terikatnya hakim lain pada suatu putusan hakim sebelumnya yang merupakan ciri khas dari sistem

peradilan di Indonesia yang mengikuti Sistem Eropa Kontinental (Ahmad Ali, 2008:99).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas maka melalui pembuktian-pembuktian dalam sidang pengadilan maka Pengadilan Negeri Makale memutuskan Penggugat pada pihak yang kalah dengan menolak Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Boni Daniel menyatakan bahwa dalam memutus perkara perdata dasar-dasar yang mendorong hakim menerapkan norma dan asas-asas hukum adat adalah karena adanya kewajiban-kewajiban normatif yang diamanatkan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pada umumnya dalam kenyataan, tidak mudah bagi hakim menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan perkara perdata, sehingga hakim mengembangkan harmonisasi penerapan norma dan asas-asas adat ke dalam sistem hukum acara perdata positif (wawancara 4 Maret 2013).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya menurut hukum adat Tana Toraja anak angkat (anak dibuang tama tambuk) mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam memperoleh harta warisan, namun anak angkat harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti harus turut melaksanakan upacara penguburan orang tua angkatnya dan tetap mangngiu' atau turut ambil bagian bersama dengan keturunannya apabila orang tua angkat atau keluarga orang tua angkatnya melaksanakan upacara rambu solo' (upacara kematian) atau rambu tuka' (upacara syukuran). Harta yang sudah merupakan *Tekken* anak angkat dari orang tua angkatnya bisa saja ditarik kembali apabila anak angkat dengan sengaja dan sadar tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, meskipun hal ini jarang ditemui karena dianggap sebagai *siri'*.
2. Prosedur pembuktian sengketa terhadap kedudukan anak angkat (anak dibuang tama tambuk) di Tana Toraja dalam memperoleh harta warisan dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Makale dalam putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl sudah sesuai dengan prosedur dimana kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah menunjukkan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi,

namun seharusnya dalam mengambil keputusan hakim wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat karena merupakan salah satu asas penyelenggara kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal (5) ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu hakim harus menerapkan harmonisasi norma-norma hukum adat ke dalam hukum acara perdata positif. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para tergugat serta merujuk pada **Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:1413 K/Pdt/1988 tanggal 18-5-1990** yang *menyebutkan bahwa apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkankan oleh orang tua angkatnya dan hukum adat Tana Toraja mengenai pembagian harta warisan ditentukan dari besarnya pengorbanan pada upacara *rambu solo*'.*

B. Saran

1. Sengketa Waris Adat yang muncul dalam masyarakat tidak selamanya dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah melainkan banyak yang masuk ke Pengadilan oleh karena itu pemerintah seharusnya menempatkan hukum adat sebagai salah satu pedoman dalam pembangunan hukum nasional.

2. Hendaknya hakim dalam memutus perkara yang menyangkut tentang hukum adat harus menerapkan harmonisasai hukum adat dengan hukum positif agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Predana Media Group
- Ali, H.Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djomali, R.Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, H. Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, H. Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq. 2010. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamil, H. Ahmad & Fauzan, H. M. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- L.T.Tangdilintin. 1975. *Toraja dan Kebudayaan*. Yayasan Lepongan Bulan
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata – Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Samudera, Teguh. 2004. *Hukum dalam Acara Perdata*. Bandung: P.T. Alumni
- Sjarif, Surini Ahlan & Elmiyah, Nurul. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat* Jakarta: Predana Media
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Maju Mundur

Soepomo, R. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita

Soeroso.R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty

Sutantio, Ny Retnowulan. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Maju Mundur

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET

http://eprints.undip.ac.id/23996/1/RATNA_PUTRI_INDRASARI.M..pdf